

PARTAI POLITIK DALAM BAYANG-BAYANG DIFISIT REPRESENTASI

**OLEH KRIS NUGROHO
FISIP UNIVERSITAS AIRLANGGA**

BEM Fapet Unsoed 2020
Kabinet Bingkai Kita



Kementerian Advokasi dan
Kesejahteraan Mahasiswa

**MOSI
#TIDAK
PERCAYA**

bamfapet_unsoed bamfapetunsoed BEM FAPET Unsoed hot6641k



**MOSI
TIDAK
PERCAYA**

#GAGALKANOMNIBUSLAW

Kandidat Kabinet Bayangan



Shofwan Al Banna

**Menteri
Luar Negeri**



Yance Arizona

**Menteri Hukum dan
Kebijakan Negara**



**Khoirunnisa Nur
Agustyati**

**Menteri Hak
Perempuan dan
Kelompok Marginal**



**Media Wahyudi
Askar**

**Menteri
Perekonomian,
BUMN, Industri,
dan Tenaga Kerja**



Armand Suparman

**Menteri Dalam Negeri,
Desa, Otonomi Daerah,
dan Keamanan Negara**



Iqbal Damanik

**Menteri Jaminan Perlindungan
Lingkungan Hidup,
Pelestari Hutan, Flora
Nusantara, dan Pembatasan
Izin Pertambangan**



**Bhima Yudhistira
Adhinegara**

**Menteri Keuangan dan
Tata Kelola Anggaran**

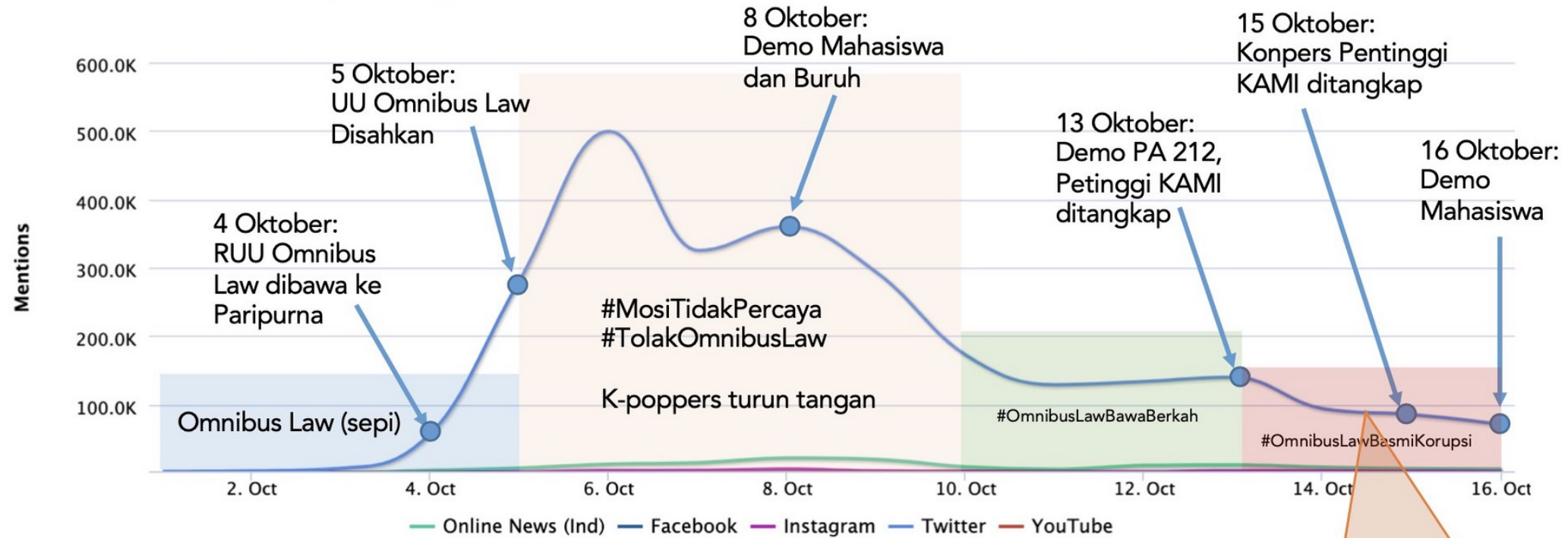
Sumber: Instagram kabinetbayangan.id

INFOGRAFIK: ANDRI



TREN OMNIBUS LAW TERKINI

The trends of total mentions by media types



Penangkapan petinggi KAMI secara signifikan berhasil menurunkan volume percakapan tentang Omnibus Law yang dominan berisi penolakan.

MENYOAL FENOMENA DEFICIT REPRESENTASI

ULASAN KELEMBAGAAN

Partai politik menjadi pilar utama demokrasi perwakilan yang dilembagakan melalui pemilihan umum dengan tujuan memilih wakil-wakil rakyat (Rodee et al, 1967; Sartori, 1977; Hansen, 2016 ; Lawson-Poguntke, 2004).

Melalui jaringan electoral nasional – local (Duverger, 1954), partai politik mampu mencapai kondisi ke arah party strength.

Party strength dapat diukur dengan indicator : kemampuan menggerakkan sumber-sumber suara, kekuatan kader dan jejaring electoral yang dibutuhkan untuk menggerakkan sumber daya partisipasi pemilih

Eksistensi partai politik secara kelembagaan berkontribusi terhadap dua hal :

1. Memfasilitasi keterlibatan rakyat dalam pemilu (*public participation*)
2. Memfasilitasi terjaminnya pemilu demokratis (*democratic election*).

Dua konsep diatas merupakan elemen yang mutlak yang memfasilitasi keterlibatan partisipatoris rakyat dalam **seleksi dan memilih** (?) aktor-aktor politik untuk mengisi jabatan-jabatan legislative atau pemerintahan. Sedangkan pemilu demokratik menjadi lahan ideal untuk proses representasi politik melalui pengisian jabatan-jabatan politik baik legislative mau pun eksekutif.

- Pengalaman electoral 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 dan 2024, menunjukkan kompetisi electoral antara partai politik cenderung konsentrasi pada upaya membangun jaringan mobilisasi politik seluas-luasnya demi meraih dukungan pemilih yang nir debat program, policy apalagi ideology.
- Partai politik saat ini cenderung bergerak ke menuju pola catch-all party, yaitu menggabungkan target ekspansi suara lintas pemilih yang pada dasarnya minim reifikasi program dan ideology.

- Walaupun diatas kertas setiap partai politik memiliki “ideologi dan program” realitasnya “ideologi dan program” tidak menjadi energi pembeda dalam kompetisi electoral.
- Lebih tepat hanya berfungsi formalitas saja. Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 dan 2024, tren nasional menunjukkan isu ideologi tidak signifikan menjadi strategi partai-partai politik dalam konstestasi electoral.
- Saya mengamati ada kerapuhan electoral (*electoral fragility*), yaitu ketidakpastian basis electoral sebagai efek karakter pemilih non ideologis mengambang (*non-ideological floating voters*) dengan frekuensi tinggi perpindahan partai (*party switching*).

Partai	1999	2004	2009	2014	2019	2024
PDIP	35.689.073	21.026.629	14.600.091	23 681.471	27.053.961	25.387.279
Golkar	23.741.749	24.480.757	15.037.757	18.432.312	17.229.789	23.208.654
PPP	11.329.905	9.248.764	6 323 147	8.157.488	6.323.147	6.323.147
PKB	13.336.982	11.989.564	13 570 097	11.298.957	13.570.097	13.570.097
PAN	7.528.956	7.313.305	9 572 623	9.481.621	9.572.623	9.572.623
PBB	2.049.708	2.970.487	1 099 848	1.825.750	1.099.848	1.099.848
PK / PKS	1.436.565	8.325.020	11.493.663	8.480.204	11.493.663	11.493.663
PD		8.455.225	21.703.137	12.728.913	10.876.507	10.876.507
Gerindra			4.646.406	14.760.371	17.594.839	20.071.708
Nasdem			--	8.402.812	12.661.792	14.660.516
Hanura			3.922.870	6.579.498	2.161.507	1.094.588

KONSEKUENSI CATCH-ALL DAN PROBLEM VOLATILITY

Catch-all sebagai strategi penyelamatan electoral (*electoral survival*) = membebaskan calon bermanuver demi *votes gain* seluas-luasnya , bukan kekuatan ideologi ; mengabaikan sumber-sumber dukungan esensial berbasis program ; mengabaikan reifikasi rasionalitas politik.

Kombinasi ***catch all party*** plus karakter reifikasi politik partai yang lemah, menghasilkan volatilitas electoral partai yang konsisten

Catch all party menghasilkan kegagalan representasi substantive.

MASALAH *PARTY TRUST*

Tentang pengakuan rakyat terhadap partai politik sebagai lembaga politik yang optimal memperjuangkan isu-isu kerakyatan.

Pemilih menaruh harapan bahwa kehadiran mereka untuk memberikan suara karena factor percaya terhadap partai dan calon-calon anggota legislative.

DEFISIT REPRESENTASI

Lemahnya system organisasi partai dalam mengendalikan otonomi calon

Kaderisasi lemah karena partai memilih jalur cepat kaderisasi dengan merekrut calon-calon non kader partai (selebritas)

Ikutan party identification (party ID) lemah karena partai kurang focus pada membangun kesadaran pemilih yang berorientasi pada substansi program, nilai dan ideology partai

Muncul personalisasi pencalonan bersumber pada individu calon yang bebas dari kendali partai, mencalonkan lewat partai namun bermanuver bebas dengan memaksimalkan mesin pribadi calon

Control terhadap preferensi pemilih lemah karena relasi partai – massa / simpatisan kurang / tidak didasarkan pada insentif yang menguntungkan pemilih.



SEKIAN TERIMA KASIH